

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi telah mempercepat proses globalisasi dan memfasilitasi pertukaran informasi secara *real-time*. Hal ini telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan yang menciptakan tantangan dan peluang baru terutama dalam bidang informasi dan komunikasi (TIK). Dalam bidang hubungan internasional, perkembangan TIK mengharuskan negara-negara untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lanskap digital (Bainus, 2023). Perkembangannya yang pesat telah menjadikan TIK sebagai alat yang sangat penting dalam diplomasi yang memungkinkan negara untuk menyampaikan pesan dan kebijakan mereka kepada masyarakat global dengan lebih efektif dan efisien (Prasasti, 2021).

Salah satu dampak dari perkembangan ini adalah munculnya platform digital dalam berbagai bentuk, seperti media sosial sebagai alat yang sangat efektif dalam menghubungkan individu, kelompok dan negara di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangannya, teknologi ini semakin penting di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahkan dalam hal kenegaraan, para aktor saling berinteraksi dalam ruang digital yang menjadi komponen penting dalam hubungan internasional atau disebut juga “hubungan internasional digital” (Barman, 2024).

Hubungan internasional digital mengacu pada dinamika dan interaksi yang terjadi antara negara-negara di dunia digital yang membentuk kembali diplomasi, tata kelola global, keamanan, perang dan perdamaian, serta memengaruhi bidang-

bidang non-tradisional seperti ekonomi. Salah satu aspek dari hubungan internasional digital ini adalah diplomasi digital (Baykov & Zinovieva, 2023).

Diplomasi digital adalah diplomasi yang menggunakan alat dan teknologi digital dalam bentuk berbagai media sosial (misalnya X, Instagram, Facebook, dkk), *blog*, *situs web*, dan platform *online* lainnya oleh negara maupun non negara (Kostadinov & Chow, 2025). Sejak abad ke-21, diplomasi digital telah menjadi aspirasi kepentingan nasional yang kemudian diimplementasikan sebagai strategi kebijakan luar negeri dan melakukan kegiatan diplomatik lain, seperti penyebaran informasi, memengaruhi opini dan membentuk persepsi publik. (Victor, A., 2021). Diplomasi digital tidak menggantikan diplomasi tradisional, namun dapat memperkuat kerja negara dalam hubungan internasional digital dengan cepat dan efektif. Hingga saat ini, diplomasi digital telah memainkan peran penting dalam mencapai kepentingan suatu negara. Salah satu media sosial yang aktif digunakan dalam diplomasi digital sampai detik ini adalah *Twitter* atau X.

X adalah media sosial yang didirikan oleh Jack Dorsy pada tahun 2006 dengan keunggulan yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan singkat maksimum 280 karakter (disebut sebagai *tweet*). Pada awalnya platform ini bernama *Twitter* hingga berganti nama menjadi “X” setelah diakuisisi oleh Elon Musk pada September 2022 (Kinasih & Mustikasari, 2024). Berdasarkan data dari *tweeteraser.com*, pengguna aktif bulanan X di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 600 juta pengguna pada pertengahan tahun 2024. Dengan popularitasnya ini, layanan X telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek,

seperti sarana kampanye, berdagang, unjuk rasa, hingga sarana pembelajaran (Ochai, 2024).

Media sosial ini lalu merangkak menjadi salah satu platform yang paling menonjol dalam dunia politik yang memungkinkan pemimpin dunia untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat internasional atau melakukan praktik diplomasi digital. Tren penggunaan X sebagai alat diplomasi dipromosikan oleh Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, pada tahun 2009. Dalam konteks diplomasi digital, Clinton memanfaatkan X untuk memperkuat komunikasi dan hubungan internasional (Putra, A. N., & Hafid, A., 2023). Sejak saat itu, banyak pemimpin dunia mulai menggunakan platform ini untuk melakukan kegiatan diplomatik, menjadikannya saluran penting dalam praktik diplomasi *modern* yang dikenal sebagai *Twitter Diplomacy* atau *Twiplomacy*.

Sebuah studi *Twiplomacy* yang dilakukan oleh perusahaan komunikasi internasional, Burson-Marsteller pada tahun 2020 menunjukkan bahwa X telah dimanfaatkan oleh pemerintah di 173 negara yang secara keseluruhan mencakup 90 persen dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Twiplomacy Study 2020, 2020). Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang paling aktif dalam penggunaan X untuk diplomasi digital yang memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan kebijakan luar negeri mereka.

Seiring perkembangan teknologi digital, media sosial seperti X semakin menjadi alat penting dalam praktik diplomasi kontemporer. Hal ini tercermin dari berbagai penelitian yang telah mengkaji penggunaan platform tersebut dalam penyampaian kebijakan luar negeri oleh para pemimpin dunia. Salah satunya adalah

penelitian Valencia dan Moscato (2021) dalam artikel “*Navigating #ObamainCuba: How Twitter Mediates Frames and History in Public Diplomacy*”, yang menunjukkan bahwa Presiden Barack Obama menggunakan X sebagai alat untuk membangun narasi diplomatik dalam rangka normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Kuba. Mereka menekankan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menciptakan komunikasi yang lebih inklusif dan membentuk citra positif negara. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokusnya hanya pada satu peristiwa diplomatik tertentu dan belum menyentuh pemanfaatan strategis X dalam situasi konflik internasional yang dinamis dan kompleks, seperti eskalasi ketegangan antara Iran dan Israel.

Penelitian lain adalah karya Cornut, Harris Rimmer, dan Choi (2022), berjudul “*The Liquidification of International Politics and Trump’s (Un) Diplomacy on Twitter*”. Studi ini menganalisis bagaimana Presiden Donald Trump menggunakan X secara personal dan provokatif, sehingga merombak pola komunikasi diplomatik tradisional. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami transformasi diplomasi digital, penelitian ini lebih menyoroti sifat unik dari gaya komunikasi Trump dibandingkan dengan strategi komunikasi kebijakan luar negeri yang sistematis. Selain itu, tidak ada analisis spesifik tentang bagaimana media sosial dimanfaatkan dalam merespons konflik bersenjata internasional atau bagaimana pendekatan tersebut berubah di bawah kepemimpinan Joe Biden, yang dikenal dengan pendekatan diplomatik yang lebih formal dan responsif. Penelitian lain mengemukakan bahwa era pemerintahan Trump yang memanfaatkan X untuk menyampaikan pesan secara langsung, sering kali dengan

gaya yang kontroversial dan provokatif yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan diplomatik. Tweet kontroversial Trump tersebut menghadirkan konsekuensi atau dampak tersendiri bagi pribadinya (Cahyaningsih & Syamsudduha, 2020).

Pergeseran dari diplomasi formal ke pendekatan yang lebih pribadi dan langsung menggambarkan bagaimana media sosial, khususnya X, dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh dalam hubungan internasional. Namun, transisi ini juga menimbulkan ketidakpastian yang dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Konflik yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel mencontohkan kompleksitas ini, karena secara signifikan mempengaruhi stabilitas regional dan menyoroti tantangan menavigasi komunikasi diplomatik di era digital (Altahmazi, 2022).

Perbedaan pendekatan antara era Obama dan Trump menunjukkan adanya evolusi dalam penggunaan media sosial sebagai instrumen diplomasi publik. Namun, masih sedikit penelitian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana Presiden Joe Biden memanfaatkan platform X untuk menyampaikan kebijakan luar negeri dalam konteks konflik internasional yang tengah berlangsung, seperti eskalasi ketegangan Iran-Israel pada tahun 2024. Padahal, sejak awal masa jabatannya pada tahun 2021, Biden menunjukkan pendekatan yang lebih transparan, hati-hati dan partisipatif dalam komunikasi kebijakan luar negeri. Kebijakannya tersebut juga memunculkan strategi baru dalam menjalin komunikasi politik yang menekankan transparansi dan responsivitas terhadap perkembangan situasi konflik. Akun resmi @POTUS maupun akun pribadinya @JoeBiden kerap

digunakan untuk menyampaikan posisi politik AS kepada audiens global, termasuk dalam momen-momen kritis (Orhan, 2021).

Meskipun telah ada penelitian sebelumnya tentang penggunaan X oleh mantan Presiden AS, tidak sepenuhnya mencerminkan kebijakan dan strategi diplomasi digital Joe Biden secara langsung terutama dalam konteks konflik bersenjata. Konflik Iran-Israel menjadi fokus penelitian karena lebih mencerminkan dinamika geopolitik kontemporer yang melibatkan perubahan aliansi, rivalitas ideologis, dan eskalasi militer langsung yang berdampak pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana **strategi penggunaan media sosial X dalam penyampaian kebijakan luar negeri Joe Biden terhadap konflik Iran-Israel.**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada dampak dari penggunaan X dalam penyampaian kebijakan luar negeri Joe Biden terhadap konflik Iran-Israel. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penggunaan media sosial X dalam penyampaian kebijakan luar negeri Joe Biden terhadap konflik Iran-Israel?
2. Bagaimana pengaruh strategi penggunaan media sosial X dalam penyampaian kebijakan luar negeri Joe Biden terhadap konflik Iran-Israel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut yakni:

1. Mengetahui strategi penggunaan media sosial X dalam penyampaian kebijakan luar negeri Joe Biden terhadap konflik Iran-Israel
2. Mengetahui pengaruh strategi penggunaan media sosial X dalam penyampaian kebijakan luar negeri Joe Biden terhadap konflik Iran-Israel.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan konsep fundamental dalam hubungan internasional yang mengacu pada tujuan dan ambisi suatu negara. Menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya "*Politics Among Nations*" (1948), kepentingan nasional berfungsi sebagai panduan bagi negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Morgenthau menekankan bahwa kepentingan nasional berkaitan erat dengan kekuasaan, di mana negara harus melindungi identitas dan integritasnya dari ancaman eksternal. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak teori dalam studi hubungan internasional.

Kepentingan nasional dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk kepentingan vital dan non-vital. Kepentingan vital mencakup aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan keamanan negara, sedangkan kepentingan non-vital lebih bersifat jangka panjang dan strategis (Papp, 1988). Kategori ini membantu negara dalam menetapkan prioritas kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Dalam konteks ini, pemahaman tentang

kepentingan nasional menjadi kunci bagi pengambil keputusan untuk merumuskan strategi yang efektif.

Dalam praktiknya, kepentingan nasional sering kali menjadi alasan di balik kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Jack C. Plano dan Roy Olton (1982), menyatakan bahwa kebijakan luar negeri harus mencerminkan kepentingan nasional sebagai faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan diplomatik atau militer yang dilakukan oleh negara tidak terlepas dari pertimbangan untuk mencapai atau mempertahankan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan luar negeri suatu negara sering kali dilakukan melalui lensa kepentingan nasional.

Serangkaian tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam konteks hubungan internasional disebut kebijakan luar negeri. Menurut George Modelski dalam buku Kegley, C.W., Jr dan Wittkopf, E.R. "*World Politics: Trend and Transformation*" (2001), kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirancang oleh berbagai komunitas untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan suatu negara serta menyesuaikan komunitas tersebut dengan dinamika yang ada di tingkat internasional. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan interaksi dengan negara lain, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor domestik yang mempengaruhi keputusan luar negeri. Dengan demikian, kebijakan luar negeri berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan domestik dan tantangan global.

Kebijakan luar negeri dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, termasuk kebijakan bilateral dan multilateral. Kebijakan bilateral melibatkan hubungan antara dua negara, sedangkan kebijakan multilateral melibatkan lebih dari dua negara atau organisasi internasional. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana negara-negara berinteraksi dan bernegosiasi dalam mencapai tujuan bersama. Kebijakan luar negeri yang efektif harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan untuk bekerjasama secara internasional (Holsti, 1983).

Tujuan dari kebijakan luar negeri sangat beragam, mulai dari keamanan nasional hingga kesejahteraan ekonomi. Dalam bukunya "*Foreign Policy in A Transformed World*", Mark Webber dan Michael Smith (2002) menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan luar negeri adalah untuk melindungi kedaulatan negara dan meningkatkan posisi internasionalnya. Kebijakan ini juga harus beradaptasi dengan perubahan kondisi global yang cepat, sehingga fleksibilitas menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam implementasinya. Dengan demikian, pemahaman tentang tujuan kebijakan luar negeri sangat penting bagi para pembuat keputusan.

## **2. Diplomasi Digital**

Diplomasi digital atau *e-Diplomacy*, merupakan konsep yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet. Diplomasi digital adalah penggunaan teknologi digital dan media sosial oleh negara untuk mencapai tujuan

diplomati dan komunikasi internasional (Ong, H.L et al., 2024). Diplomasi digital mencakup berbagai aktivitas, mulai dari penyebaran informasi hingga interaksi langsung dengan publik global. Dengan memanfaatkan platform digital, negara dapat membangun citra positif, menjangkau masyarakat yang lebih luas, dan merespons isu-isu internasional secara lebih cepat. Diplomasi digital juga memungkinkan negara untuk berpartisipasi dalam diskusi global dan membentuk opini publik di era informasi yang cepat berubah.

Seiring dengan berkembangnya media sosial, diplomasi digital telah menjadi alat yang efektif dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan media sosial memungkinkan diplomat untuk terhubung dengan masyarakat yang lebih luas dan beragam. Hal ini menciptakan peluang bagi negara untuk menyampaikan pesan diplomatik secara langsung tanpa perantara media tradisional. Pergeseran ini meningkatkan efektivitas komunikasi dan mendorong keterlibatan publik yang lebih besar (Fasinu et al., 2024). Diplomasi digital juga mendukung upaya negara dalam membangun *soft power* melalui keterlibatan publik dan transparansi serta berperan penting dalam membangun hubungan internasional yang akuntabel. Perkembangan penggunaan media sosial sebagai sarana diplomasi melahirkan istilah atau konsep-konsep yang lebih spesifik, salah satunya diplomasi Twitter (Hassan & Batool, 2024).

Diplomasi Twitter atau *Twiplomacy* (penggunaan Twitter atau sekarang X) sebagai alat diplomasi telah menjadi fenomena yang semakin

penting dalam hubungan internasional. Media sosial ini memungkinkan pemimpin dunia untuk berkomunikasi secara langsung dengan publik dan menyampaikan pesan diplomatik dalam format yang singkat dan padat. Platform ini juga memberikan kesempatan bagi negara untuk merespons isu-isu terkini dengan cepat, yang dapat mempengaruhi persepsi publik dan hubungan internasional. Dengan karakteristiknya yang viral, X dapat mempercepat penyebaran informasi dan membentuk narasi yang diinginkan oleh negara (Graham & Graham, 2024).

*Twiplomacy* tidak hanya terbatas pada komunikasi satu arah tetapi juga menciptakan interaksi dinamis antara negara-negara. Dalam penelitian “*Twiplomacy by Indonesian Ambassadors and Embassies*” oleh Mohamad Rendy Irawan Ifran, Ella Prihatini, dan Tirta Nugraha Mursitama (2023), menjelaskan bahwa diplomat dapat menggunakan X untuk memantau opini publik dan merespons isu-isu yang muncul secara *real-time*. Hal ini memungkinkan negara untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi internasional dan mengelola krisis dengan lebih efisien. *Twiplomacy* berfungsi sebagai alat strategis yang memperkuat posisi negara di arena global.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan secara holistik dengan menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, serta diterapkan dalam konteks alamiah dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif berfungsi untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keunikan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dimulai dari pengumpulan data, menggunakan teori yang ada sebagai dasar penjelasan yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan baru (Nasution, 2023). Oleh karena itu, metode deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan strategi penggunaan media sosial X dalam penyampaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Iran-Israel di era pemerintahan Joe Biden.

## **2. Jenis Data**

Penulis akan menggunakan jenis data sekunder, yaitu data dan informasi-informasi yang mencakup berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dokumen, arsip pemerintahan, surat kabar dan literatur- literatur lain dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Anwar, 2022).

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis akan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*) yang mencakup pengumpulan data dan informasi melalui berbagai bahan yang tersedia secara *online* di internet dan secara *offline* di perpustakaan pusat kampus Universitas Hasanuddin, seperti buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dan mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyimpulan data dengan tujuan utama

menemukan solusi untuk masalah (Sari & Asmendri, 2020). Selain itu, penulis juga akan berfokus di akun media sosial X resmi dari Presiden Amerika Serikat yang telah digunakan oleh Joe Biden (@POTUS) yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini.

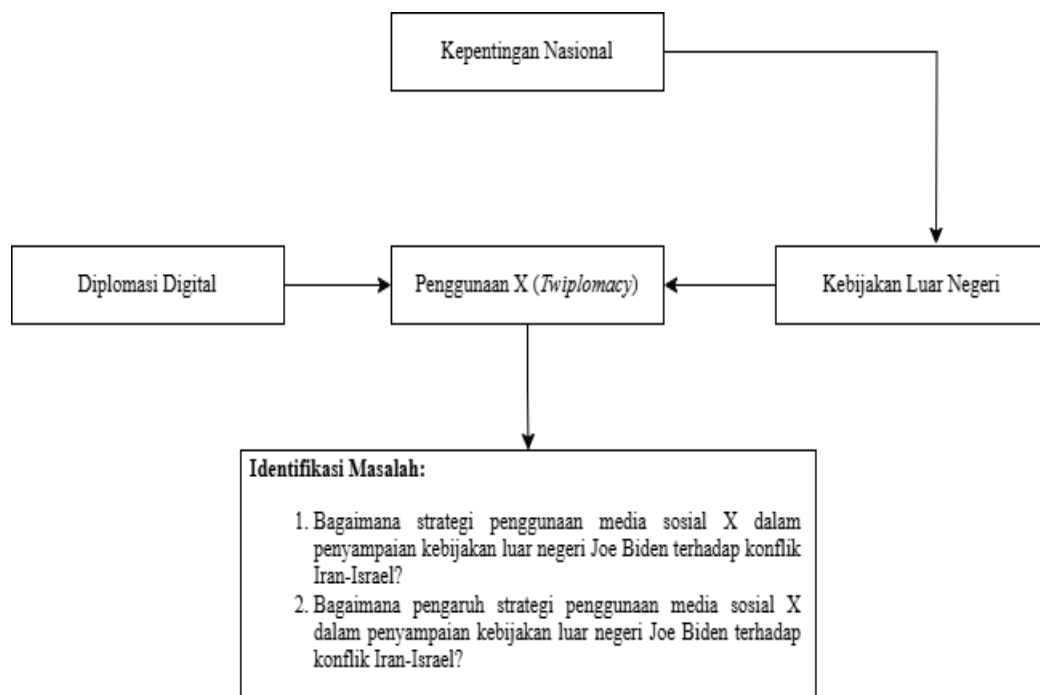
#### **4. Teknik Analisis Data**

Penulis akan menerapkan teknik analisis data kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif melalui tiga proses utama: pengurangan data, penyajian data, dan verifikasi. Pengurangan data melibatkan pemilihan, pengelompokan, dan penyederhanaan informasi yang relevan untuk fokus pada aspek-aspek penting dari fenomena yang diteliti. Selanjutnya, penyajian data adalah proses di mana peneliti menyusun informasi yang telah dikurangi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau narasi deskriptif. Proses ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola dan hubungan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Setelah itu, verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan dengan cara membandingkan data yang ada dengan teori atau literatur yang relevan. Dengan demikian, analisis data kualitatif tidak hanya sekadar mengolah informasi, tetapi juga berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan makna di balik data tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan bermakna terkait dengan isu yang diteliti (Nasution, 2023).

## 5. Metode Penulisan

Penulis akan menerapkan metode penulisan deduktif, yang dimulai dengan permasalahan umum dalam penelitian yang didasarkan pada teori dan konsep yang relevan. Setelah itu, penulis akan menyajikan penjelasan atau bukti pendukung yang lebih spesifik terkait isu yang dibahas. Dalam penulisan deduktif ini, gagasan utama disajikan terlebih dahulu lalu diperjelas oleh argumen pendukung dan contoh konkret untuk memperkuat gagasan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan penelitian yang lebih terfokus dan terarah (Kumar, 2021).

## F. Skema Pembahasan



**Gambar 1. 1 Skema Pembahasan**

Bagan diatas berfungsi untuk memperlihatkan operasional skema pembahasan di mana penulis akan menggunakan dua konsep yaitu kepentingan nasional dan diplomasi digital. Konsep kepentingan nasional digunakan penulis untuk melihat dan mengidentifikasi kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap konflik Iran-Israel yang diimplementasikan sebagai kebijakan luar negeri di era pemerintahan Joe Biden. Kemudian, menganalisis strategi penyampaian kebijakan luar negeri tersebut melalui konsep diplomasi digital yang lebih lanjut dibahas menggunakan konsep *Twiplomacy*.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kepentingan Nasional**

Teori kepentingan nasional yang pertama kali diperkenalkan oleh Hans Morgenthau dalam bukunya “*Politics Among Nations*” (1948), merupakan salah satu pilar utama dalam studi hubungan internasional. Morgenthau berargumen bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya yang mencakup keamanan, kekuasaan dan kesejahteraan. Konsep ini menekankan bahwa negara adalah aktor rasional yang selalu berusaha memaksimalkan kepentingannya dalam interaksi internasional.

Definisi kepentingan nasional terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika global, misalnya definisi oleh Jack C. Plano & Roy Olton serta Daniel S. Papp. Kepentingan nasional didefinisikan oleh Plano dan Olton sebagai kepentingan vital yang mencakup kemandirian, pelestarian diri, integritas wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi yang menekankan aspek-aspek fundamental untuk menjamin kelangsungan hidup dan kedaulatan negara (Plano & Olton, 1982). Di sisi lain, Daniel memperluas konsep ini dengan menekankan peningkatan perekonomian melalui keseimbangan perdagangan dan penguatan industri, serta memasukkan dimensi ideologi dan moralitas. Pendekatannya mencerminkan pergeseran dari fokus eksklusif pada keamanan tradisional ke konsep yang lebih holistik, mencakup kesejahteraan ekonomi, nilai-nilai ideologis, dan kepatuhan terhadap norma-norma internasional (Papp, 1988).

Di era globalisasi, dimensi non-tradisional seperti ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia semakin diakui sebagai bagian integral dari kepentingan nasional. Hal ini mencerminkan pergeseran dari fokus eksklusif pada *hard power* (kekuatan militer dan ekonomi) ke kombinasi yang lebih seimbang, yakni antara *hard power* dan *soft power* (Nye, 2020). Joseph Nye dalam “*Soft Power and American Foreign Policy*” (2020) menekankan pentingnya *soft power* sebagai kemampuan untuk mempengaruhi melalui nilai-nilai budaya, diplomasi, dan kebijakan publik dalam mencapai kepentingan nasional.

Kepentingan nasional tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan situasi domestik dan internasional. Perubahan dalam lingkungan strategis, seperti munculnya ancaman baru atau pergeseran kekuatan global dapat memengaruhi prioritas kepentingan nasional suatu negara. Dinamika ini terjadi karena pada dasarnya kepentingan nasional merupakan respons terhadap tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks politik, ekonomi dan keamanan. Sebagai contoh, dalam konteks konflik Iran-Israel, kepentingan nasional AS telah mengalami pergeseran seiring dengan perubahan dinamika kawasan Timur Tengah dan perkembangan politik domestik di AS sendiri (Jones, 2022).

Kepentingan nasional AS juga dipengaruhi oleh dinamika politik domestik. Pergantian pemerintahan dari Donald Trump ke Joe Biden membawa perubahan dalam pendekatan AS terhadap konflik Iran-Israel. Pemerintahan Trump yang cenderung mengambil kebijakan yang lebih keras terhadap Iran dan lebih mendukung kepentingan Israel, seperti pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota

Israel dan normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab. Namun, pemerintahan Biden berupaya untuk menyeimbangkan kembali kebijakan AS dengan memprioritaskan diplomasi dan upaya revitalisasi JCPOA, sambil tetap menjaga komitmen terhadap keamanan Israel (Smith, 2023).

Pergeseran ini menunjukkan bagaimana perubahan politik domestik dapat memengaruhi definisi dan prioritas kepentingan nasional. Selain itu, perkembangan regional dan global juga turut memengaruhi kepentingan nasional AS dalam konflik ini. Meningkatnya pengaruh China dan Rusia di Timur Tengah, termasuk hubungan mereka dengan Iran menjadi salah satu pemicu yang memaksa AS untuk mempertimbangkan kembali strateginya di kawasan tersebut. Menurut Mearsheimer (2021), persaingan strategis ini mendorong AS untuk memperkuat aliansinya dengan Israel dan negara-negara Arab moderat sebagai upaya menjaga pengaruhnya di Timur Tengah. Hal ini mencerminkan bagaimana pergeseran kekuatan global dapat memengaruhi prioritas kepentingan nasional suatu negara.

Dalam mewujudkan kepentingan nasional, negara membutuhkan instrumen yang dapat digunakan dalam merespons tantangan dan peluang di tingkat internasional, sekaligus memastikan bahwa kepentingan nasionalnya terpenuhi. Instrumen utama yang dibutuhkan ini adalah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai seperangkat strategi, metode dan pedoman yang digunakan suatu negara dalam menjalankan hubungannya dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Ahmed, 2020).

Graham Allison salah satu ahli yang mengembangkan konsep kebijakan luar negeri dengan tujuan melengkapi teori kepentingan nasional. Dalam bukunya yang berjudul "*Essence of Decision*" (1971), berfokus pada proses pembuatan keputusan. Allison menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya dibentuk oleh kepentingan nasional, tetapi juga oleh dinamika birokrasi, politik domestik, dan tekanan internasional. Ia menawarkan tiga model analitis yang membantu menjelaskan bagaimana keputusan kebijakan luar negeri dibuat dalam konteks dinamika internal dan eksternal, yaitu:

1. **Model Rasional**, mengasumsikan bahwa negara bertindak sebagai aktor rasional yang memaksimalkan kepentingan nasionalnya dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia dan memilih opsi terbaik untuk mencapai tujuannya.
2. **Model Proses Organisasi**, menjelaskan bahwa keputusan kebijakan luar negeri merupakan hasil dari prosedur dan rutinitas standar organisasi, di mana keputusan sering kali dibuat berdasarkan kebiasaan, protokol, dan struktur birokrasi yang ada.
3. **Model Politik Birokratis**, menekankan bahwa kebijakan luar negeri adalah hasil dari pertarungan kepentingan dan negosiasi antara berbagai aktor dan kelompok dalam pemerintahan, di mana keputusan akhir mencerminkan kompromi dan dinamika kekuasaan internal.

Perkembangan konsep Allison dalam studi hubungan internasional telah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih holistik tentang kebijakan luar negeri. Sejak publikasi "*Essence of Decision*", para akademisi dan praktisi mulai melihat

kebijakan luar negeri bukan hanya sebagai hasil dari kepentingan nasional yang statis, tetapi sebagai produk dari interaksi kompleks antara berbagai aktor dan institusi. Konsep ini juga telah diadaptasi dan diperluas untuk memasukkan faktor-faktor baru seperti globalisasi, aktor non-negara, dan teknologi (Yustiningrum, 2024).

Proses transformasi kepentingan nasional ini menjadi kebijakan luar negeri melibatkan berbagai faktor, baik domestik maupun internasional. Faktor domestik mencakup opini publik, kepentingan kelompok politik dan ideologi pemerintah. Faktor internasional seperti aliansi, ancaman keamanan dan dinamika sistem internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh interaksi antara aktor negara dan non-negara, seperti organisasi internasional, kelompok lobi dan korporasi multinasional (Al-Fahad, 2024). Dalam sistem internasional yang anarkis, negara cenderung bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanannya. Namun, dalam era globalisasi, kebijakan luar negeri juga harus mempertimbangkan kepentingan global, seperti perdamaian internasional dan pembangunan berkelanjutan (Mearsheimer, 2021).

Dalam proses implementasi, banyak negara menggunakan pendekatan strategis tertentu untuk menyesuaikan kebijakan mereka dengan dinamika politik global. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam merancang kebijakan luar negeri di tengah ketegangan geopolitik adalah “*dual-track approach*.” Pendekatan ini merupakan strategi dalam kebijakan luar negeri yang menggabungkan dua jalur secara simultan, yaitu jalur diplomatik (*soft power*) dan tekanan strategis (*hard power*), dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu

negara. Strategi ini biasanya diterapkan dalam konteks konflik atau ketegangan internasional, terutama dalam situasi di mana negara ingin menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus meningkatkan insentif bagi lawan untuk berkompromi (Nye, 2004).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas faktor domestik dan internasional dalam formulasi kebijakan luar negeri, penting untuk memahami tidak hanya alasan di balik pembuatan kebijakan, tetapi juga cara implementasi dan komunikasinya kepada publik global. Dalam konteks ini, media sosial menjadi sarana bagi pemerintahan Biden untuk mengkomunikasikan kebijakan luar negeri secara efektif dalam merespons perkembangan konflik Iran-Israel. Teori kepentingan nasional menjelaskan “mengapa” suatu kebijakan dibuat, sementara teori kebijakan luar negeri menjelaskan “bagaimana” kebijakan tersebut diimplementasikan. Relevansi kedua teori dengan penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan strategi komunikasi digital pemerintahan Biden.

## **B. Diplomasi Digital**

Diplomasi digital merupakan perkembangan dari diplomasi tradisional yang mengadopsi teknologi digital dalam interaksi antarnegara. Harold Nicolson (1939) dalam bukunya “*Diplomacy*” mendefinisikan diplomasi sebagai seni negosiasi dan komunikasi yang bertujuan mencapai kepentingan nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi, diplomasi tidak lagi terbatas pada pertemuan bilateral atau komunikasi melalui kedutaan besar, tetapi telah berevolusi menjadi diplomasi

digital yang menggunakan internet dan media sosial sebagai alat utama komunikasi politik dan diplomasi publik (Nicolson, 1939).

Corneliu Bjola dan Marcus Holmes (2015) dalam “*Digital Diplomacy: Theory and Practice*” memberikan kerangka teoritis yang lebih jelas tentang diplomasi digital. Mereka mendefinisikan diplomasi digital sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan fungsi diplomasi, termasuk komunikasi antarnegara, diplomasi publik serta negosiasi kebijakan luar negeri. Bjola dan Holmes menekankan bahwa diplomasi digital tidak hanya mempermudah interaksi diplomatik, tetapi juga mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan transparansi kebijakan luar negeri.

Menurut Bjola dan Holmes (2015), diplomasi digital memiliki tiga fungsi utama:

1. Diplomasi publik digital dengan menggunakan teknologi digital oleh untuk membentuk opini publik global dan mempromosikan kebijakan luar negeri.
2. Diplomasi bilateral dan multilateral dengan menggunakan media sosial dan teknologi digital yang memungkinkan komunikasi langsung antara aktor diplomatik di berbagai negara untuk mempercepat koordinasi kebijakan luar negeri.
3. Keamanan dan diplomasi siber dengan menggunakan teknologi dalam diplomasi juga menimbulkan tantangan baru, seperti ancaman siber, disinformasi dan manipulasi digital dalam hubungan internasional.

Selain itu, buku “*The Digitalization of Public Diplomacy*” oleh Ilan Manor (2019) semakin memperluas konsep diplomasi digital dengan menekankan bahwa diplomasi digital tidak hanya digunakan oleh negara, tetapi juga oleh aktor non-negara dalam membentuk opini publik internasional dan memengaruhi agenda diplomatik global. Manor berpendapat bahwa alat digital memungkinkan diplomasi menjadi lebih transparan dan inklusif, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam hal penyebaran informasi yang dapat dengan mudah dimanipulasi. Dengan demikian, adanya resiko dari praktik penggunaan diplomasi digital harus dikelola dengan hati-hati. Penyebaran informasi yang terlalu cepat juga dapat memicu ketegangan diplomatik. Potensi manipulasi dan serangan siber muncul akibat ketergantungan pada platform digital yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, strategi diplomasi digital yang efektif harus menggabungkan pemanfaatan teknologi dengan pengelolaan risiko komunikasi internasional (Ong et al, 2024)

Perkembangan teori diplomasi digital dalam studi hubungan internasional telah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih holistik tentang peran teknologi dalam diplomasi. Pada awalnya, diplomasi tradisional mengandalkan saluran resmi dan tertutup, seperti pertemuan bilateral, konferensi internasional dan komunikasi melalui kedutaan besar. Namun, dengan munculnya teknologi digital, diplomasi menjadi lebih terbuka, cepat dan langsung. Media sosial seperti X, Instagram, Facebook, dan YouTube digunakan sebagai salah satu alat diplomasi digital. (Bjola & Manor, 2020). Perubahan dalam praktik diplomasi akibat kemajuan teknologi digital mendorong pentingnya strategi yang terarah dan menyeluruh. Dalam kajian hubungan internasional, strategi tidak hanya dipahami sebagai rencana jangka

panjang, tetapi juga sebagai seni dalam menyelaraskan tujuan politik dengan sumber daya yang tersedia. Liddell Hart dalam bukunya “*Strategy: The indirect approach*” (1967) mendefinisikan strategi sebagai seni mendistribusikan dan menggunakan alat kekuatan, termasuk militer, untuk mencapai tujuan kebijakan. Seiring waktu, strategi berkembang menjadi *grand strategy*, yakni pendekatan komprehensif yang mencakup aspek militer, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dalam perkembangannya, Freedman menekankan bahwa strategi bukanlah proses statis, melainkan proses dinamis yang menuntut pemimpin mampu mengelola kontradiksi, menyeimbangkan ambisi dan kenyataan, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan (2017).

Salah satu bentuk konkret penerapan strategi dalam diplomasi digital adalah melalui pemanfaatan media sosial yang populer, yaitu X. Diplomasi X atau yang lebih dikenal sebagai *Twiplomacy* (Diplomasi Twitter) adalah penggunaan X oleh pemimpin negara dan diplomat untuk berkomunikasi langsung dengan publik, menyampaikan kebijakan luar negeri dan membangun hubungan internasional secara efisien. Selain itu, *Twiplomacy* mencerminkan transisi dalam praktik diplomasi yang tidak hanya terpusat pada pemerintah tetapi juga melibatkan publik dan berbagai pemangku kepentingan lainnya melalui interaksi digital (Idris, 2021).

*Twiplomacy* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik diplomasi yang dilakukan melalui platform media sosial, khususnya X. Menurut Radhika Chhabra (2020), *Twiplomacy* mengacu pada interaksi antara pemimpin dunia dan publik melalui tweet, yang memungkinkan penyampaian pesan diplomatik secara langsung dan cepat. Konsep ini mencerminkan perubahan

signifikan dalam cara diplomasi dilakukan, di mana komunikasi tidak lagi terbatas pada saluran formal dan tradisional. Istilah “*Twiplomacy*” pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 melalui sebuah studi yang menganalisis penggunaan X oleh kepala negara dan pemimpin dunia. Penelitian ini menunjukkan bahwa X telah menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pandangan dan kebijakan, serta untuk berinteraksi dengan audiens global (Twiplomacy Study 2020, 2020).

Sejak diperkenalkan, *Twiplomacy* telah mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya penggunaan X di kalangan pemimpin dunia. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan menjangkau audiens secara luas dalam waktu singkat. Melalui X, pemimpin dapat menyampaikan pesan diplomatik kepada jutaan orang secara langsung, menegaskan posisi negara dalam isu internasional, serta membangun aliansi strategis dengan lebih terbuka. Komunikasi ini turut membentuk citra pemimpin yang responsif dan adaptif terhadap dinamika global. Dalam situasi krisis, X dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan mengoordinasikan respons secara cepat, menjadikannya instrumen strategis dalam komunikasi dan pengelolaan kebijakan luar negeri secara *real-time*. Secara keseluruhan, diplomasi digital dan *Twiplomacy* telah mengubah dinamika hubungan internasional. Negara-negara kini mengandalkan media sosial untuk menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan menangani krisis. Namun, perubahan ini juga menuntut strategi komunikasi yang matang dan kebijakan adaptif agar manfaat teknologi dapat dioptimalkan tanpa mengganggu stabilitas internasional (Khalid et al., 2020).